

Ideologi Politik dan Motivasi Pelayanan Publik di Kalangan PNS Kota Padang

Oleh: Syamsir dan Muhamad Ali Embi

ABSTRACT

Political ideology has been assumed to be correlated with public service motivation (PSM) as indicated by some researchers in developed countries. This study was designed to investigate the correlation between political ideology and PSM among civil servants in Padang City. Mixing approach was used in this study. Using Anova test on responses by 417 respondents of civil servants in Padang City, this study tested the correlation between political ideology and PSM among the employees, in terms of the differences in the level of PSM based on political ideology followed by respondents. The findings of this study indicated that political ideology was significantly correlated to the level of PSM.

Kata Kunci: *Motivasi Pelayanan Publik, ideologi politik, Pegawai Negeri Sipil (PNS)*

I. PENDAHULUAN

Penelitian menyangkut motivasi pelayanan publik (*public service motivation* atau *PSM*) sangat penting dilakukan dan seharusnya diberi perhatian serius oleh para peneliti sektor publik, karena motivasi pelayanan publik merupakan faktor penting yang akan menentukan berkualitas atau tidaknya suatu pelayanan yang diberikan oleh seseorang pegawai publik atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada masyarakat yang memerlukannya. Apalagi bila mengingat bahwa pelayanan publik merupakan tugas penting dan menyangkut kepentingan orang banyak.

Namun kadangkala tugas-tugas pelayanan publik bisa saja dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik atau aliran politik yang

dianut oleh para pegawai publik yang bersangkutan. Dengan kata lain, seorang pegawai publik (PNS) yang menganut aliran politik tertentu bisa saja memiliki kadar atau tingkat motivasi pelayanan publik tertentu sesuai dengan keyakinan dan ideologi politik yang dianutnya¹, dan pada akhirnya akan berpengaruh pula kepada kualitas pelayanan publik yang diberikannya kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan mereka.

¹ Syamsir. 2012. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Perkhidmatan Awam: Kajian Kes di Kalangan Pekerja Awam dan Swasta di Padang, Sumatera Barat, Indonesia". *Ph.D. Thesis*. Sintok, Kedah Darul Aman, Malaysia: University Utara Malaysia.

Hasil penelitian Lewis dan Frank² di Amerika Serikat antara lain mengungkapkan bahwa faktor ideologi politik mempunyai hubungan dengan tingkat motivasi seorang pegawai dalam memberikan pelayanan publik. Ada indikasi bahwa orang-orang beraliran (berhaluan) politik Demokrat di Amerika lebih menyukai pekerjaan atau pelayanan di sektor publik dibandingkan orang-orang yang berasal dari atau berhaluan politik Republik. Dengan kata lain, mereka yang berhaluan politik (pengikut partai) Demokrat biasanya memiliki tingkat motivasi pelayanan publik yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang berhaluan politik (pengikut partai) Republik.

Permasalahan motivasi pelayanan publik di kalangan PNS di Indonesia dalam kaitannya dengan keyakinan (ideologi) politik ini sangat menarik untuk diteliti karena, selain belum banyak (jarang) diteliti, keterkaitan antara keyakinan (ideologi) politik dan motivasi pelayanan publik sangat mungkin terjadi di kalangan para pegawai, termasuk para PNS, khususnya di Kota Padang. Apalagi bila mengingat bahwa netralitas PNS masih “diragukan” dalam implementasinya, meskipun undang-undang dan berbagai peraturan tentang PNS lainnya telah menetapkan dan menginstruksikan hal tersebut kepada setiap PNS.

Sementara di sisi lain peranan motivasi pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas seorang PNS sebagai

pelayan publik. Selain itu, setiap pelayanan publik memang seharusnya terbebas dari pengaruh aliran (ideologi) politik agar mereka benar-benar mampu memberikan pelayanan publik yang prima kepada semua masyarakat tanpa pandang bulu apakah masyarakat yang dilayaninya itu sama atau berbeda aliran politiknya dengan mereka

Motivasi pelayanan publik (*Public Service Motivation* atau PSM) merupakan konsep yang tergolong masih baru dalam kajian ilmu administrasi publik yang berbeda maknanya dengan konsep motivasi pada umumnya. Konsep motivasi secara umum merujuk kepada kekuatan yang memberi dorongan, mengarahkan, dan mengekalkan tingkah laku seseorang individu³. Sedangkan motivasi pelayanan publik atau PSM adalah salah satu bentuk atau bagian yang khas dari motivasi yang dapat didefinisikan sebagai motivasi yang mencakup kepercayaan, nilai, dan sikap yang melampaui kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi, mendorong seorang pekerja (pegawai) untuk berbuat baik kepada orang lain dan menyumbangkan darma baktinya kepada kesejahteraan organisasi dan masyarakat⁴. Artinya, konsep PSM menunjukkan bahwa seorang pegawai publik akan terlibat dalam tingkah laku yang konsisten terhadap motif

² Lewis, Gregory B. and Sue A. Frank. 2002. “Who Wants to Work for the Government”. *Public Administration Review*. July/Agust 2002, Vol. 62, No. 4. p. 395-404.

³ Perry, James L., and Porter, Lyman W. 1982. “Factors Affecting the Context for Motivation in the Public Sector”. *Academy of Management Review* 7 (Jan.):89-98.

⁴ Perry, James L. and Annie Hondeghem, eds. 2008. *Motivation in Public Management: The Call of Public Service*. Oxford: Oxford University Press.

yang berorientasikan komunitas dan sikap altruistik.

Motivasi pelayanan publik yang positif tentu saja akan boleh melahirkan pekerja (pegawai) yang kompeten dan berdedikasi tinggi terhadap tugas dan kewajibannya serta dapat meningkatkan prestasi kerja. Menyadari akan pentingnya motivasi pelayanan publik di kalangan PNS di Indonesia, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan untuk peningkatan motivasi pelayanan publik di kalangan PNS di Indonesia, seperti menaikkan gaji, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia PNS, memperbaiki sistem kenaikan pangkat (jabatan), menerapkan disiplin, dan sebagainya. Kesemua usaha ini diharapkan akan dapat menciptakan PNS yang berkualitas, profesional, responsif, akuntabel, berdedikasi tinggi, dan bertanggungjawab terhadap tugas yang menjadi kewajibannya, sehingga ia dapat meningkatkan prestasi kerja PNS.

Namun demikian, walaupun banyak kebijakan telah dilaksanakan, akan tetapi masih banyak terdapat kelemahan dan permasalahan di kalangan PNS di Indonesia, termasuk di Kota Padang Sumatera Barat. Hal ini diasumsikan berkaitan erat dengan rendahnya motivasi pelayanan publik yang terdapat di kalangan PNS. Tanpa adanya motivasi pelayanan publik yang tulus dari PNS dalam memposisikan diri sebagai pegawai publik yang berkewajiban memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat maka usaha pemerintah tersebut tentu tidak akan ada artinya.

Selain dari persoalan gaji yang rendah, kurangnya pilihan lapangan

pekerjaan, dan kehidupan ekonomi yang belum mapan, persoalan keyakinan (ideologi) politik yang dianut oleh PNS boleh jadi turut serta mempengaruhi keadaan motivasi pelayanan publik dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hasil kajian Perry⁵ antara lain menemukan bahwa motivasi pelayanan publik tersebut dipengaruhi oleh pelbagai faktor, di antaranya adalah ideologi politik (*political ideology*).

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang ingin diungkap dan dijawab dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan yang signifikan antara faktor ideologi (keyakinan) politik dan motivasi pelayanan publik di kalangan PNS Kota Padang? Sebagai jawaban sementara (*hypothesis*) terhadap rumusan masalah penelitian ini adalah terdapatnya hubungan yang signifikan antara ideologi (keyakinan) politik dan motivasi pelayanan publik di kalangan PNS Kota Padang.

II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Secara etimologis konsep motivasi pelayanan publik merujuk kepada konsep *public service motivation (PSM)* seperti yang dikembangkan oleh para peneliti administrasi publik di Barat. Konsep ini mengandung makna sebagai motivasi yang mendorong seseorang pekerja atau pega-

⁵Perry, James, L. 1997. "Antecedents of Public Service Motivation". *Journal of Public Administration Research and Theory (J-PART)*. April 1997. p. 181-197.

wai untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik (rakyat).

Perry dan Wise⁶ mendefinisikan motivasi pelayanan publik atau PSM (*public service motivation*) sebagai kecenderungan seseorang individu untuk memberikan respons motif yang secara umum dan unik terdapat dalam institusi publik, yang meliputi ketertarikan kepada pembuatan kebijakan publik, tanggungjawab kepada kepentingan publik dan kewajiban sebagai warga negara, perasaan simpati atau kasihan, dan sikap pengorbanan diri. Sementara Crewson⁷ mengemukakan bahwa PSM ialah orientasi pelayanan seseorang individu agar berguna bagi masyarakat, orientasi untuk menolong orang lain, dan semangat untuk memperoleh prestasi yang bersifat intrinsik atau yang berorientasi pelayanan.

Motivasi pelayanan publik sangat penting dipahami dan dipertimbangkan dalam pelayanan karena ia sangat menentukan keberhasilan seseorang pekerja atau pegawai dalam pelaksanaan tugas, terutama pekerja sektor publik. Perry dan Hondeghem⁸ menjelaskan bahwa penelitian mengenai motivasi pelayanan publik telah mendapat banyak perhatian para peneliti dalam dua dekade terakhir ini, dan minat para peneliti terhadap

hal ini terus berkembang dari waktu ke waktu.

Permasalahan motivasi pelayanan publik (*Public Service Motivation*) telah sering menjadi topik penelitian di Barat dalam usaha mencari dan memahami konsep ideal bagi pelayanan publik dan dalam usaha pengembangan ilmu administrasi dan manajemen publik. Konsep motivasi pelayanan publik menurut Vandenebee⁹ telah dikembangkan sebagai pengimbang terhadap motivasi kepentingan-diri (*self-interest*) yang ditemukan dalam teori pilihan rasional. Sedangkan menurut Willem, Vos, dan Buelens¹⁰ konsep motivasi pelayanan publik diperkenalkan untuk menunjukkan motivasi yang berdasarkan nilai-nilai dan sikap yang melampaui kepentingan diri sendiri atau kepentingan organisasi.

Setiap pegawai sektor publik memang seharusnya memiliki motivasi yang semata-mata hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik dan bukan untuk kepentingan dan kebutuhan pribadi semata-mata atau untuk kepentingan yang bersifat ekstrinsik. Motivasi seorang pegawai publik yang lebih mengutamakan kepentingan orang lain atau kepentingan negara daripada kepentingan

⁶ Perry, James, L. and Lois Recascino Wise. 1990. "The Motivational Bases of Public Service". *Public Administration Review* 50 (May/June): 367-373.

⁷ Crewson, P.E. 1997. "Public Service Motivation: Building Empirical Evidence of Incidence and Effect". *Journal of Public Administration Research and Theory (J-PART)*. (4) p. 499-518.

⁸ Perry, James L. and Annie Hondeghem, eds. 2008. *Op cit*.

⁹ Vandenebee, Wouter. 2007. "Toward A Public Administration Theory of Public Service Motivation: An institutional approach". *Public Management Review*. Vol. 9 Issue 4; 2007; 545 – 556

¹⁰ Willem, Annick, Ans De Vos, and Marc Buelens. 2010. "Comparing Private and Public Sector Employees' Psychological Contracts: Do they Attach Equal Importance to Generic Work Aspects?". *Public Management Review*. Vol. 12 Issue 2 2010 275–302.

diri pribadi inilah yang dipahami sebagai motivasi pelayanan publik.

Salah satu temuan yang paling penting dalam penelitian menyangkut PSM ini adalah hasil penelitian Perry dan Wise¹¹ terhadap para pegawai sektor publik dan para pekerja sukarela (*volunteers*) di Amerika Syarikat. Kedua sarjana ini telah berhasil memberikan dan mendudukan definisi atau konsep PSM dan alat ukur yang berbeda dari konsep lain yang berkaitan dengan motivasi pada umumnya. Selain itu, menurut Perry dan Wise, individu yang mempunyai tingkat PSM yang tinggi akan tertarik kepada pekerjaan pelayanan publik karena berbagai sebab, seperti kepentingan diri pribadi, pertimbangan etika, atau peluapan emosi. Mereka berasumsi bahwa PSM berkaitan erat dengan kecenderungan bekerja, prestasi kerja, dan pilihan kerja dari seseorang pegawai publik.

Berdasarkan atas rangka kerja ini, Perry seterusnya mengembangkan skala pengukuran yang terkenal dan dapat mengukur tingkat PSM berdasarkan empat dimensi, yaitu: 1) ketertarikan terhadap pembuatan kebijakan publik (*attraction to public policy making*), 2) tanggungjawab terhadap kepentingan publik dan kewajiban sebagai warga negara (*commitment to public interest and civic duty*), 3) perasaan simpati atau kasihan (*compassion*), dan 4) pengorbanan diri (*self-sacrifice*)¹². Keempat

¹¹ Perry, James, L. and Lois Recascino Wise. 1990. *Op cit*.

¹² *Ibid*; Perry, James, L. 1996. "Measuring Public Service Motivation: An Assessment of Construct Reliability and Validity".

dimensi inilah yang pada umumnya terdapat pada para pegawai di berbagai sektor publik.

Meskipun terdapat keberagaman definisi PSM, namun dari berbagai definisi tersebut dapat dipahami bahwa motivasi pelayanan publik merupakan motivasi yang bersifat intrinsik yang dimiliki oleh seseorang pegawai dan yang lebih mendahulukan kepentingan orang lain atau negara daripada kepentingan pribadi. Motivasi pelayanan publik merupakan karakteristik atau ciri khas dan sepatutnya terdapat di kalangan pegawai publik. Namun bukan berarti bahwa ia hanya semata-mata terdapat di kalangan pegawai sektor publik saja.

Berbagai hasil penelitian tentang PSM di negara-negara maju, terutama negara-negara Barat, menunjukkan bahwa terbentuknya motivasi setiap individu untuk memilih pekerjaan sebagai pekerja publik dipengaruhi oleh berbagai faktor dan keadaan atau latar belakang kehidupan setiap individu yang bersangkutan. Pandey dan Stazyk¹³ mengemukakan bahwa latar belakang (*antecedent*) yang mempengaruhi PSM dapat dikategorikan ke atas tiga hal yaitu: faktor sosio-demografi (*socio-demographic factors*), latar belakang institusi sosial (*social institution antecedents*), dan

Journal of Public Administration Research and Theory (J-PART). Volume 6, No. 1, p. 5-23

¹³ Pandey, Sanjay K. and Edmund C. Stazyk. 2008. "Antecedent and Correlates of Public Service Motivation" dalam Perry, James L., and Annie Hondeghem, eds. 2008. *Motivation in Public Management: The Call of Public Service*. Oxford: Oxford University Press.

latar belakang organisasi (*organizational antecedents*). Faktor sosio-demografi diantaranya yaitu faktor yang berhubungan dengan umur, pendidikan, dan jenis kelamin. Latar belakang institusi sosial yaitu faktor-faktor yang berkenaan dengan sosialisasi keluarga, sosialisasi agama, dan profesionalisme. Sedangkan latar belakang organisasi yaitu faktor-faktor yang antara lain berhubungan dengan budaya organisasi, aturan-aturan birokrasi, perubahan dalam organisasi, level hirarki, dan masa kerja organisasi.

Dalam salah satu kajian Perry¹⁴ dijelaskan pula bahwa motivasi pelayanan publik itu dipengaruhi oleh berbagai latar belakang dari seseorang individu yang berkenaan dengan lima perkara, yaitu: 1) Sosialisasi dalam keluarga (*Parental/Family Socialization*), 2) Sosialisasi Agama (*Religious Socialization*), 3) Profesionalisme (*Professional Identification*), 4) Ideologi Politik (*Political Ideology*), dan 5) Korelasi atau karakteristik Demografi (*Demographic Correlates*).

Dalam kaitannya dengan hubungan antara faktor sosio-demografi, penelitian tentang PSM selama ini lebih banyak melihat hubungan antara PSM dengan faktor umur, jenis kelamin, dan pendidikan. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara PSM dan ideologi (keyakinan) politik seseorang pegawai sangat jarang diteliti.

Para peneliti yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan hal ini hanyalah penelitian

Perry¹⁵ dan penelitian Lewis dan Frank¹⁶ yang mencoba melihat pengaruh faktor ideologi politik (*political ideology*) terhadap tingkat PSM para pegawai di Amerika Serikat. Menurut Perry, perbedaan ideologi telah menyebabkan perbedaan tingkat motivasi dalam pelayanan publik. Pegawai yang berpaham atau berhaluan politik liberal lebih bermotivasi dibandingkan mereka yang berhaluan politik konservatif. Artinya, semakin liberal haluan ideologi seseorang maka akan semakin positif pula hubungannya terhadap motivasinya dalam pelayanan publik.

Sedangkan Lewis dan Frank yang juga melakukan penelitian di Amerika Serikat dan mengungkapkan bahwa faktor ideologi politik mempunyai hubungan dengan tingkat motivasi seorang pegawai dalam memberikan pelayanan publik. Ada indikasi bahwa orang-orang beraliran (berhaluan) politik Demokrat di Amerika lebih menyukai pekerjaan atau pelayanan di sektor publik dibandingkan orang-orang yang berasal dari atau berhaluan politik Republik.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixing*) kuantitatif dan kualitatif dengan jenis penelitian *expost-facto*. Artinya data penelitian ini sudah tersedia dalam bentuk pengalaman PNS dalam memberikan pelayanan kepada publik selama ini dan motivasi yang terbangun dalam diri mereka sebagai pelayan publik. Populasi penelitian

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Lewis, Gregory B. and Sue A. Frank. 2002. *Op cit*.

¹⁴Perry, James, L. 1997. *Op cit*.

ini adalah para PNS yang tersebar pada berbagai instansi pemerintahan di Kota Padang sebanyak lebih kurang 27.292 PNS¹⁷. Sampel ditarik dengan menggunakan teknik *multi-stage random sampling* sebanyak 417 orang PNS.

Alat pengumpul data yang digunakan adalah angket, yang dikembangkan berdasarkan indikator yang dimiliki variabel melalui proses validitas isi (*content validity*) dengan rancangan kisi-kisi. Pengambilan data juga dilengkapi dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan statistik berupa persentase, *mean*, dan *anova* untuk analisis kuantitatif dan model analisis interaktif untuk data kualitatif. Pada tahap akhir hasil analisis diinterpretasikan sejalan dengan variabel yang diteliti.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel penelitian bertujuan untuk melihat gambaran karakteristik dari variabel-variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini akan dibahas hubungan antara faktor ideologi (keyakinan) politik dan variabel motivasi pelayanan publik atau PSM di kalangan PNS di Kota Padang. Berikut ini dapat dilihat deskripsi dari masing-masing variabel dan dimensi atau indikator penelitian:

a. Komposisi PNS berdasarkan ideologi politik

Deskripsi komposisi responden PNS Kota Padang berdasarkan ideologi (keyakinan) politik di kalangan PNS Kota Padang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

¹⁷ Bappeda Prov. Sumatera Barat dan BPS Prov. Sumatera Barat. 2010. *Sumatera Barat dalam Angka 2009/2010*. Bappeda Prov. Sumbar dan BPS Prov. Sumbar.

Tabel 1. Komposisi Sampel PNS Kota Padang Berdasarkan Ideologi Politik

No	Ideologi (Keyakinan) Politik	Jumlah PNS	%
1.	Berasaskan Kagamaan	261	62,6
2.	Berasaskan Kerakyatan	78	18,7
3.	Berasaskan Kebangsaan	47	11,3
4.	Lain-lain/Golput	31	7,4
Jumlah		417	100.0

Dilihat dari aspek ideologi (keyakinan) politik responden, terlihat bahwa responden yang mempunyai keyakinan politik berasaskan keagamaan lebih banyak daripada mereka yang mempunyai keyakinan politik yang lainnya, yaitu sebanyak 261 orang (62,6%). Sedangkan responden yang mempunyai keyakinan politik berasaskan kerakyatan adalah sebanyak 78 orang (18,7%). Responden PNS yang mempunyai keyakinan politik berasaskan kebangsaan ada pula sebanyak 47 orang (11,3%).

Sementara responden yang termasuk kelompok lain-lain atau responden yang menyatakan diri mereka sebagai kelompok responden *golongan putih (golput)* atau *independent*, ada pula sebanyak 31 orang (7,4 %).

b. Tingkat PSM di kalangan PNS berdasarkan ideologi politik

Deskripsi data variabel motivasi pelayanan publik (PSM) di kalangan PNS Kota Padang dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Deskripsi tingkat motivasi pelayanan publik (PSM) di Kalangan PNS berdasarkan ideologi (keyakinan) politik PNS Kota Padang

Faktor Ideologi (Keyakinan) Politik	Mean	Anova	Sig.
1. Berasaskan Keagamaan	3,43	5.756	0.001
2. Berasaskan Demokrasi	3,50		
3. Berasaskan Nasionalisme	3,54		
4. Lain-lain/Golput	3,36		

Sumber: hasil olahan data penelitian 2012

Merujuk kepada Tabel 2 di atas terlihat bahwa tingkat motivasi pelayanan publik (PSM) terindikasi mempunyai hubungan yang signifikan dengan keyakinan politik ($F = 5.756$, $p < 0.001$). Ini berarti bahwa perbedaan dalam faktor keyakinan (ideologi) politik diprediksi dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan untuk

menentukan tinggi atau rendahnya tingkat PSM di kalangan PNS.

Dengan kata lain, hasil pengujian *Anova* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat PSM berdasarkan aspek keyakinan politik di kalangan PNS adalah berbeda secara signifikan di antara PNS yang mempunyai keyakinan politik yang

berasaskan keagamaan, berasaskan kerakyatan (demokrasi), berasaskan kebangsaan (nasionalisme), dan mereka yang tidak menganut salah satu paham politik atau Golput. *Mean* tingkat PSM bagi PNS yang berkeyakinan politik berasaskan kebangsaan atau nasionalisme (*mean* = 3,54) terindikasi lebih tinggi dibandingkan *mean* tingkat PSM bagi PNS yang berkeyakinan politik berasaskan kerakyatan atau demokrasi (*mean* = 3,50) atau PNS yang berkeyakinan politik berasaskan keagamaan (*mean* = 3,43) ataupun *mean* tingkat PSM bagi PNS yang Golput (*mean* = 3,36).

Sementara hasil pengujian *Post Hoc Bonferroni* (Tabel 3) menunjukkan pula bahwa perbedaan nilai *mean* tingkat PSM adalah signifikan di antara PNS yang berkeyakinan politik kebangsaan (nasionalisme) dengan PNS yang berkeyakinan politik berasaskan keagamaan dan kelompok PNS Golput.

Begitu juga di antara PNS yang termasuk kelompok Golput dengan PNS yang berkeyakinan politik kerakyatan (demokrasi).

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa PNS yang mempunyai keyakinan politik berasaskan kebangsaan atau nasionalisme mempunyai tingkat motivasi pelayanan publik atau PSM yang baik (tinggi) dibandingkan dengan PNS yang mempunyai keyakinan politik berasaskan keagamaan atau kerakyatan ataupun kelompok PNS Golput. Sebaliknya PNS yang termasuk kelompok Golput kurang mempunyai motivasi pelayanan publik atau PSM dibandingkan ketiga-tiga kelompok PNS yang berkeyakinan politik berasaskan kebangsaan (nasionalisme), keagamaan, ataupun kerakyatan (demokrasi). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perbedaan keyakinan politik ikut menentukan tinggi atau rendahnya tingkat PSM di kalangan PNS.

Tabel 3. Perbedaan Tingkat PSM Menurut Keyakinan Politik

Mean Tingkat PSM				df	Nilai F	Sig.
Berasaskan Agama	Berasaskan Demokrasi	Berasaskan Nasionalisme	Golput			
3.4330	3.4957	3.5375	3.3633	403	5.756	0.001
Uji Bonferroni						
Berasaskan Nasionalisme & Berasaskan Agama		Berasaskan Nasionalisme & Golput		Berasaskan Demokrasi & Golput		
0.012		0.005		0.039		

Sumber: hasil olahan data penelitian 2012

Temuan penelitian ini juga diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan, antara lain mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat serta bebe-

rapa Kepala Kantor dan Kepala Bagian di beberapa instansi Pemerintahan Kota Padang yang secara umumnya menyatakan bahwa:

”Keyakinan politik adalah berkaitan erat dengan pandangan atau sikap seseorang dalam memandang keadaan di lingkungan masyarakat dan bagaimana seseorang akan memperlakukan masyarakat. Oleh karena itu adalah wajar bila seorang pegawai yang berkeyakinan politik yang berbeda akan mengakibatkan perbedaan pula sikap dan motivasinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi kita menyadari bahwa persaingan politik di negeri kita ini cukup tajam, tentu saja hal itu akan turut mempengaruhi suasana pelayanan publik di negeri ini”.

Dari rangkuman hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pemahaman seseorang pegawai terhadap keyakinan politik tertentu berkeungkinan akan menentukan pula tingkah laku mereka dalam memberikan pelayanan kepada publik. Dengan kata lain, keyakinan kepada sesuatu pandangan pastilah akan mempengaruhi tingkah laku seseorang dalam melakukan sesuatu pekerjaan, termasuk dalam memberikan pelayanan.

Hasil penelitian tentang kesignifikan hubungan di antara faktor keyakinan (ideologi) politik dan tingkat PSM di kalangan PNS Kota Padang seperti telah dipaparkan dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat PSM di kalangan PNS Kota Padang mempunyai hubungan yang signifikan dengan faktor keyakinan politik. Jika dikaitkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti di negara-negara maju di

Barat maka dapat dipahami bahwa hasil penelitian ini memiliki persamaan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti tersebut sebelum ini.

Dalam kajian-kajian terdahulu, misalnya, Perry¹⁸ menemukan bahwa tingkat PSM di kalangan pekerja dipengaruhi oleh berbagai faktor dari seseorang individu yang berkenaan dengan beberapa hal, di antaranya faktor ideologi politik (*Political Ideology*). Perry yang telah melakukan penelitian terhadap 375 para pekerja di Amerika menemukan bahwa perbedaan ideologi politik telah menyebabkan perbedaan tingkat motivasi seseorang pekerja dalam pelayanan kepada publik. Perbedaan paham politik di antara paham liberal (*liberalism*) dan paham konservatif (*conservatism*) mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat PSM di kalangan pekerja Amerika. Para pekerja yang menganut kepercayaan atau paham politik liberal terindikasi lebih bermotivasi dibandingkan pekerja yang menganut kepercayaan atau paham politik konservatif.

Artinya, semakin liberal kepercayaan ideologi seseorang pekerja maka akan semakin positif atau tinggi pula motivasinya dalam pelayanan publik. Sebaliknya, semakin konservatif kepercayaan ideologi seseorang pekerja maka akan semakin rendah pula motivasinya dalam pelayanan publik. Dalam budaya politik di Amerika Serikat, Partai Republik dilihat sebagai parti yang berhaluan konservatif, sedangkan Partai Demokrat adalah parti berhaluan liberal. Ini berarti bahwa para pekerja yang

¹⁸ Perry, James, L. 1997. *Op cit.*

berasal dari kelompok partai politik Demokrat lebih bermotivasi dibandingkan pekerja dari kelompok partai politik Republik.

Temuan penelitian ini juga mendapati bahwa faktor keyakinan (ideologi) politik juga mempunyai hubungan yang signifikan dengan tahap MPA. Ini berarti bahwa keanekaragaman ideologi politik yang dianut atau diyakini oleh seseorang PNS akan menentukan tingkat PSM dan hasil penelitian ini mendapati bahwa PNS yang mempunyai keyakinan politik berdasarkan kebangsaan (nasionalisme) dan kerakyatan (demokrasi) mempunyai tingkat PSM yang lebih tinggi dibandingkan PNS yang mempunyai keyakinan politik berdasarkan keagamaan atau mereka yang tidak mempunyai keyakinan politik (Golput).

Salah satu alasan yang dapat menjelaskan hal ini ialah bahwa keyakinan politik yang berdasarkan kebangsaan (nasionalisme) dan kerakyatan (demokrasi) adalah dua bentuk keyakinan atau kepercayaan yang berkaitan erat dengan persoalan motivasi pelayanan publik. Sikap yang peduli kepada kepentingan bangsa dan kepentingan rakyat sudah pasti akan menyebabkan dan memungkinkan seseorang lebih bermotivasi dalam memberikan pelayanan yang bermakna kepada orang lain.

Sepertimana telah dipaparkan pada bagian kajian kepustakaan, motivasi pelayanan publik berkaitan sangat erat dengan sikap patriotisme atau nasionalisme, yaitu suatu semangat kecintaan kepada masyarakat atau semua bangsa yang berada

dalam negaranya tanpa memperhatikan batasan politik dan etnik. Para individu yang mempunyai sifat seperti ini biasanya akan selalu lebih mendahulukan kepentingan negaranya daripada kepentingan dirinya sendiri. Mereka juga mempunyai kesetiaan (*loyalty*) yang tinggi kepada negara, dan bersedia berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya.

Begitu pula motivasi pelayanan publik berkaitan sangat erat dengan sikap atau sifat *altruisme*, yaitu suatu sifat dan perilaku yang suka menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan hanya semata-mata termotivasi untuk mensejahterakan orang lain atau rakyat pada umumnya. Seseorang yang memiliki sifat *altruisme* berarti ia tidak mementingkan diri sendiri dan tidak pernah menuntut imbalan atau bayaran dari sesuatu yang ia kerjakan untuk orang lain. Orang-orang yang mempunyai sifat seperti ini akan bersikap dan berperilaku hanya semata-mata ingin menolong dan memberi keuntungan kepada orang lain. Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa seseorang yang memiliki sifat-sifat patriotisme atau nasionalisme dan *altruisme* akan memungkinkannya untuk mempunyai tingkat PSM yang lebih tinggi dibandingkan yang lain, karena seseorang yang memiliki sifat-sifat seperti ini pastilah akan lebih mengutamakan kepentingan orang lain dan berusaha untuk menyingkirkan kepentingan diri sendiri.

Akan tetapi dalam kasus di kalangan PNS Kota Padang, semangat kecintaan kepada negara dan bangsa (paham nasionalisme dan patriotisme)

serta paham demokrasi tampaknya lebih kuat terdapat di kalangan PNS atau pegawainya. Keadaan ini tentu saja akhirnya dapat mempengaruhi tingginya tingkat PSM di kalangan PNS yang mempunyai kepercayaan politik berasaskan nasionalisme dan demokrasi dibandingkan mereka yang mempunyai kepercayaan politik berasaskan agama, seperti ditemukan dalam penelitian ini.

Keadaan seperti ini antara lain dapat dijelaskan bahwa paham politik yang berkembang di Indonesia, termasuk di Kota Padang ini, lebih dipengaruhi oleh berkembangnya budaya politik parokial dan budaya politik subjek¹⁹, yaitu budaya politik yang terdapat di kalangan masyarakat yang tidak mau ambil pusing tentang urusan politik, tidak begitu mempersoalkan perkembangan politik, dan rata-rata tingkat kesadaran politik masyarakatnya masih rendah.

Selain itu M. Din Syamsuddin, seperti dikutip oleh Solihin²⁰, mengemukakan bahwa salah satu hal yang bersifat kontradiktif dalam konteks perhubungan politik antara Islam dan negara yang berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia adalah terjadinya marginalisasi partai Islam. Walaupun umat Islamnya dominan

namun mereka hanya berperanan sedikit (marginal) dalam kehidupan politik di negara Indonesia.

Selanjutnya, menurut Assyaukanie²¹, delegitimasi terhadap partai-partai Islam di Indonesia semenjak era Reformasi telah menimbulkan dampak yang sangat kentara terhadap perilaku politik orang-orang Islam, antaranya ialah bebasnya (bolehnya) orang-orang Islam untuk memilih partai politik mana pun yang mereka sukai dan tidak lagi mesti berasaskan aliran ideologis yang mereka anut. Orang Islam boleh memilih partai apa pun yang bersesuaian dengan kemauan mereka. Tidak ada lagi perbedaan yang tajam di antara partai Islam dan partai sekuler, karena orang-orang Islam boleh memilih partai sekuler dan memperjuangkan aspirasi politik mereka di sana. Keadaan seperti ini antara lain berdampak pada ramainya orang-orang Islam yang taat agama memasuki partai-partai sekuler yang mempunyai paham non-keagamaan, seperti nasionalisme dan demokrasi.

Dengan demikian keadaan seperti ini tentu saja menyebabkan partai-partai sekuler tidak lagi dikuasai oleh tokoh-tokoh sekuler, akan tetapi juga oleh tokoh-tokoh yang perilaku politiknya sedikit banyaknya dipengaruhi oleh ideologi atau paham agama. Akhirnya partai-partai politik yang mempunyai paham non-keagamaan (sekuler) seperti

¹⁹Kartaprawira, Rusadi. 1999. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo; Widhiastini, Ni Wayan. 2008. "Evaluasi Sistem Politik Indonesia Era Orde Baru dan Reformasi". *Sarathi*, Vol. 15, 3 Oktober 2008: 323-331.

²⁰Solihin. 2007. "Pandangan M. Amien Rais Tentang Politik Islam Indonesia: Telaah Atas Hubungan Islam dan Negara". *Laporan Penelitian*. Bandung: Lembaga Penelitian UIN SGD.

²¹Assyaukanie, Luthfi. 2012. "Islam Politik di Indonesia dan Mesir: Sebuah Perbandingan". *Makalah*. Disampaikan dalam Diskusi "Islam Politik di Timur Tengah dan Indonesia" di Komunitas Salihara, 25 Januari 2012.

paham nasionalisme dan demokrasi sedikit banyaknya juga sudah diwar-nai atau dipengaruhi pula oleh sema-ngat atau paham keagamaan. Inilah yang pada akhirnya berkemungkinan menjadi penyebab lebih tingginya tingkat PSM para PNS yang mem-punyai paham politik nasionalisme dan demokrasi dibandingkan PNS yang mempunyai paham politik berasaskan keagamaan. Pada dasar-nya PNS yang menganut paham politik nasionalisme atau demokrasi juga banyak yang berasal dari orang-orang yang pada dasarnya mempu-nyai paham keagamaan yang kuat dan taat.

V. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa memang terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor ideologi (keyakinan) politik PNS dan tingkat motivasi pelayanan publik atau PSM yang mereka miliki. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa temuan penelitian ini memiliki persamaan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu pada negara-negara maju, terutama di Barat, sehingga hasil penelitian ini dapat memper-kokoh teori dan hasil penelitian tersebut.

Hasil penelitian ini mempunyai beberapa implikasi bagi pengem-bangan teori dalam ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik dan moti-vasi pelayanan publik. Artinya, hasil penelitian ini boleh memberikan sumbangan pemikiran dan lebih

memperkaya khasanah ilmu penge-tahuan yang berkaitan dengan admi-nistrasi publik.

Berbagai hasil penelitian terda-hulu seringkali menemukan bahwa akar permasalahan buruknya birokrasi atau kepegawaian negara di Indonesia pada dasarnya berkaitan dengan dua hal pokok, diantaranya yaitu perma-salahan *internal* sistem kepegawaian negara itu sendiri yang dapat dilihat dari subsistem yang membentuk kepegawaian negara. Subsistem ini diantaranya yaitu proses rekrutmen dan seleksi pegawai.

Kegagalan pemerintah untuk menciptakan pembaharuan berkenaan dengan proses rekrutmen dan seleksi pegawai itu telah melahirkan para pegawai atau birokrat yang dicirikan oleh kerusakan moral dan kesen-jangan dalam kemampuan pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Hal ini antara lain disebabkan oleh proses rekrutmen dan pemilihan pegawai (pekerja) belum mempertimbangkan aspek motivasi dalam proses rekrutmen dan seleksi tersebut. Aspek motivasi menjadi PNS dan seterusnya motivasi pelay-anan publik ini sangatlah perlu dipertimbangkan karena motivasi yang baik dari PNS akan sangat menentukan kualitas dan produk-tivitas kerjanya apabila kelak mereka telah menjadi PNS.

Akhirnya, mengingat bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain berkenaan dengan ruang lingkup lokasi pene-litian, maka hasil kajian ini tentu saja tidak memiliki pretensi untuk digene-ralisasikan terhadap seluruh PNS yang ada di Indonesia. Oleh karena

itu bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif di berbagai lokasi di Indonesia. Demikian pula disarankan agar penelitian yang serupa semakin banyak dibuat di negara-negara dunia ketiga lainnya, kerana

sampai saat ini penelitian tentang PSM lebih banyak dilakukan di negara maju yang tentu saja memiliki berbagai perbedaan karakteristik dalam banyak hal dibandingkan negara-negara dunia ketiga.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Assyaukanie, Luthfi. 2012. "Islam Politik di Indonesia dan Mesir: Sebuah Perbandingan". *Makalah*. Disampaikan dalam Diskusi "Islam Politik di Timur Tengah dan Indonesia" di Komunitas Salihara, 25 Januari 2012.
- Bappeda Prov. Sumatera Barat dan BPS Prov. Sumatera Barat. 2010. *Sumatera Barat dalam Angka 2009/2010*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
- Crewson, P.E. 1997. "Public Service Motivation: Building Empirical Evidence of Incidence and Effect". *Journal of Public Administration Research and Theory (J-PART)*. (4) p. 499-518.
- Kartaprawira, Rusadi. 1999. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Lewis, Gregory B. and Sue A. Frank. 2002. "Who Wants to Work for the Government". *Public Administration Review*. July/Agust 2002, Vol. 62, No. 4. p. 395-404.
- Pandey, Sanjay K. and Edmund C. Stazyk. 2008. "Antecedent and Correlates of Public Service Motivation" dalam Perry, James L., and Annie Hondeghem, eds. 2008. *Motivation in Public Management: The Call of Public Service*. Oxford: Oxford University Press.
- Perry, James, L. 1996. "Measuring Public Service Motivation: An Assessment of Construct Reliability and Validity". *Journal of Public Administration Research and Theory (J-PART)*. Volume 6, No. 1, p. 5-23
- _____. 1997. "Antecedents of Public Service Motivation". *Journal of Public Administration Research and Theory (J-PART)*. April 1997. p. 181-197.
- Perry, James L. and Annie Hondeghem, eds. 2008. *Motivation in Public Management: The Call of Public Service*. Oxford: Oxford University Press.
- Perry, James, L. and Lois Recascino Wise. 1990. "The Motivational Bases of Public Service". *Public Administration Review* 50 (May/June): 367-373.

- Perry, James L., and Porter, Lyman W. 1982. "Factors Affecting the Context for Motivation in the Public Sector". *Academy of Management Review* 7 (Jan.):89-98.
- Solihin. 2007. "Pandangan M. Amien Rais Tentang Politik Islam Indonesia: Telaah Atas Hubungan Islam dan Negara". *Laporan Penelitian*. Bandung: Lembaga Penelitian UIN SGD.
- Syamsir. 2012. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Perkhidmatan Awam: Kajian Kes di Kalangan Pekerja Awam dan Swasta di Padang, Sumatera Barat, Indonesia". *Ph.D. Thesis*. Sintok, Kedah Darul Aman, Malaysia: University Utara Malaysia.
- Vandenabeele, Wouter. 2007. "Toward A Public Administration Theory of Public Service Motivation: An institutional approach". *Public Management Review*. Vol. 9 Issue 4; 2007; 545 – 556
- Widhiastini, Ni Wayan. 2008. "Evaluasi Sistem Politik Indonesia Era Orde Baru dan Reformasi". *Sarathi*, Vol. 15, 3 Oktober 2008: 323-331.
- Willem, Annick, Ans De Vos, and Marc Buelens. 2010. "Comparing Private and Public Sector Employees' Psychological Contracts: Do they Attach Equal Importance to Generic Work Aspects?". *Public Management Review*. Vol. 12 Issue 2 2010 275–302.

